

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**RIRIN INAYAH  
NIM. 07011281419104**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UIVERSITAS SRIWIJAYA  
AGUSTUS 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**(Studi pada Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Palembang tahun 2017)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**

**Oleh :**

**Ririn Inayah  
07011281419104**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018**

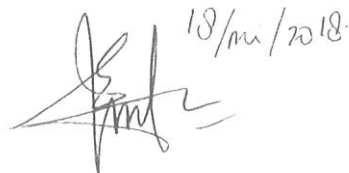
**Pembimbing I**

**Dra. Martina, M.Si.  
NIP. 196603051993022001**



**Pembimbing II**

**Ermanovida, S.Sos, M.Si.  
NIP. 196911191998032001**

*18/mi/2018*  


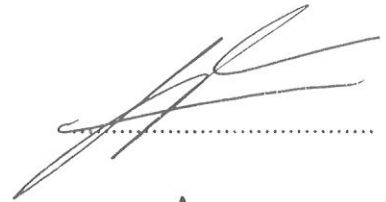
## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018

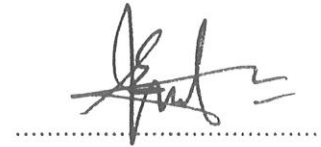
Ketua:

1. Dra. Martina, M.Si  
NIP. 196603051993022001

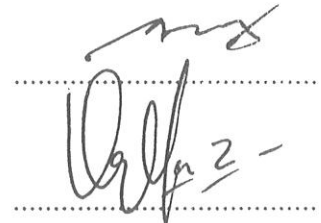


Anggota:

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001



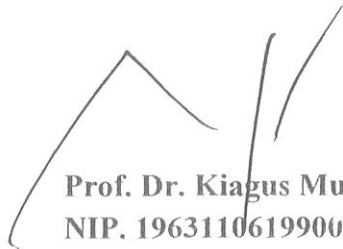
2. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001



3. Dr. Nengyanti, M.Hum  
NIP. 19670121992032002

Mengetahui:

**Dekan FISIP**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP. 196311061990031001

**Ketua Jurusan Administrasi Negara,**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA**  
NIP. 198108272009121002

Motto :

Jalan menuju kesuksesan ibarat metamorfosa kupu-kupu, terkadang seseorang harus mengalami fase penuh perjuangan, maka sesulit apapun masalah jangan pernah putus asa. Selalu ada jawaban disetiap doa, dan selalu ada jalan bagi yang selalu berusaha.

(Ririn Inayah)

Terucap Syukur pada-MU ya Rabb

Kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Adikku yang sangat kusayangi
3. Dosen Pembimbing Skripsi
4. Almamaterku Universitas Sriwijaya

## **ABSTRACT**

*This research entitled Implementation of Drug Abuse Prevention Policy by the National Narcotics Agency of South Sumatera Province in 2017. This research was motivated by the problem of cases of drug abuse and illicit trafficking, especially in the increasingly widespread province of South Sumatera. Although there is a drug abuse prevention policy from the National Narcotics Agency (BNNP) of South Sumatera Province, the number of drug cases is increasing every year. The purpose of this research was to determine the performance of the Implementation of Drug Abuse Prevention Policy by the National Narcotics Agency of South Sumatera Province. The type of research used is descriptive with qualitative methods. Data collection techniques use observation techniques, in-depth interviews and documentation. The theory used in this research is the theory of policy implementation by Donald Van Meter and Van Horn, which suggests that there are six variables that affect the performance of policy implementation, namely standards and policy objectives, resources, communication between organizations, characteristics of implementing agencies, attitudes of implementers, and conditions economic, social and political. The results of this research indicate that the Performance Implementation of Drug Abuse Prevention Policy by the National Narcotics Agency of South Sumatera Province has achieved performance targets but based on the implementation indicators there are still some obstacles including the lack of operational funds for drug abuse prevention activities so that prevention activities are also limited, and coordination is minimal between the Provincial National Narcotics Agency and Partner Institutions. The results of this research recommend that the policy be modified so that it is more practical by paying attention to suggestions such as greater budget support from the National Narcotics Agency of South Sumatera Province, as well as improving continuous communication with target groups, as well as expanding the range of implementation of prevention activities in South Sumatera, especially in District / City that does not have a National Narcotics Agency (BNN) vertical agency.*

**Keywords: Implementation, Prevention of Drug Abuse, National Narcotics Agency of South Sumatera Province**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di Povinsi Sumatera Selatan yang semakin marak . Meskipun ada kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan namun jumlah kasus narkoba semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Donald Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, sikap para pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai target kinerja namun berdasarkan indikator implementasi masih terdapat beberapa kendala antara lain minimnya dana operasional untuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga kegiatan pencegahan juga terbatas, dan kurang maksimalnya koordinasi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi dengan Lembaga Mitra. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan dimodifikasi sehingga lebih praktis dengan memperhatikan saran-saran seperti dukungan anggaran yang lebih besar lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan komunikasi secara kontinyu dengan kelompok sasaran, serta memperluas jangkauan pelaksanaan kegiatan pencegahan di wilayah Sumatera Selatan terutama di Kabupaten/Kota yang belum memiliki instansi vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN).

**Kata Kunci : Implementasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur di berikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa, banyak kendala yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat pertolongan dari Allah SWT serta restu dari keluarga kendala tersebut dapat diatasi. Terimakasih penulis ucapkan teruntuk kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu medoakan dan memberi dukungan kepada penulis.

Selain itu pula, tanpa bantuan yang diperoleh dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih serta rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2014-2018
8. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku pembimbing akademik atas bimbingan dan pengarahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas ilmu yang telah diberikan.
13. Seluruh pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

14. Seluruh pihak Informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu dalam memberikan data-data guna penyelesaian skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Tak lepas dari kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2018  
Penulis,

Ririn Inayah  
Nim. 07011281419104



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Landasan Teori.....	8
1. Kebijakan Publik.....	8
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	11

3. Teori Implementasi Kebijakan.....	14
4. Narkoba.....	19
5. Penyalahgunaan Narkoba.....	21
B. Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	24
C. Teori Implementasi yang Digunakan dalam Penelitian.....	26
D. Kerangka Pemikiran.....	28
E. Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Definisi Konsep.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Fokus Penelitian.....	36
E. Informan Penelitian.....	37
f. Jenis dan Sumber Data.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Keabsahan Data.....	39
I. Teknik Analisis Data.....	39
J. Sistematika Penulisan.....	42
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional.....	43
B. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.....	48
1. Sejarah Berdirinya BNNP Sumatera Selatan.....	48
2. Visi Misi BNNP Sumatera Selatan.....	50

3. Tugas Pokok BNNP Sumatera Selatan.....	54
4. Unit Kerja BNNP Sumatera Selatan.....	54
5. Struktur Organisasi BNNP Sumatera Selatan.....	59
<b>C. Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>	
Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.....	60
1. Standar dan Sasaran Kebijakan.....	61
2. Sumber Daya.....	69
3. Komunikasi Antar Organisasi.....	74
4. Karakteristik Agen Pelaksana.....	80
5. Disposisi Impelementor.....	81
6. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik.....	85
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus dan Tersangka Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan.....	3
2. Tersangka Narkoba Berdasarkan Umur.....	4
3. Kegiatan Seksi Pencegahan.....	6
4. Penelitian Terdahulu.....	31
5. Fokus Penelitian.....	36
6. Standar Pencegahan Narkoba.....	62
7. Daftar BNNK di Provinsi Sumatera Selatan.....	77
8. Matriks Hasil Temuan Wawancara.....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kasus Narkoba Berdasarkan Pekerjaan.....	4
2. Bagan Poses Implementasi.....	13
3. Model Implementasi Ripley dan Franklin.....	15
4. Model Implementasi Grindle.....	17
5. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn.....	19
6. Kerangka Pemikira.....	30
7. Analisis Model Interaktif.....	41
8. Struktur Organisasi BNN.....	48
9. Gedung BNNP Sumatera Selatan.....	50
10. <i>Screen Shoot</i> Akun Facebook BNNP Sumsel.....	64
11. <i>Screen Shoot</i> Akun Instagram BNNP Sumsel.....	64
12. <i>Log Frame</i> Bidang Pencegahan.....	68
13. Daftar penyuluh Narkoba Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M).....	71
14. Aplikasi Sistem Informasi Narkoba.....	77
15. Intensitas Koordinasi ke BNNK.....	78
16. Dukungan Gubernur Sumatera Selatan tentang kebijakan Narkoba.....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lembar perubahan Judul Skripsi.....	98
2. Pedoman Dokumentasi.....	99
3. Pedoman Observasi.....	100
4. Pedoman Wawancara.....	101
5. Matriks Wawancara.....	103
6. Foto Penelitian.....	110
7. Surat penunjukan dosen pembimbing.....	111
8. Kartu bimbingan skripsi pembimbing I.....	112
9. Kartu bimbingan skripsi pembimbing II.....	113
10. Lembar Revisi.....	115
11. Surat penelitian di BNN Sumatera Selatan.....	119
12. Surat penelitian di Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan.....	121
13. Surat Penelitian di Satres Narkoba Polresta Palembang.....	122
14. Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang P4GN.....	123
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	126

## DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

### Singkatan

1. P4GN : Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba
2. *UNODC* : *United Nations Office on Drugs and Crimes*
3. BNN : Badan Narkotika Nasional
4. BNNP : Badan Narkotika Nasional Provinsi
5. Sumsel : Sumatera Selatan
6. BNNK : Badan Narkotika Kabupaten/Kota
7. INPRES : Intruksi Presiden

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, Narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalahgunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah di luar batas dosis/*over dossis*.

Kejahatan narkoba digolongkan sebagai extra-ordinary international organized crime dengan jaringannya yang meng-global. Selain itu, kejahatan narkoba terjadi menembus batas-batas yuridiksi suatu Negara yang tidak mengenal batas Negara. Narkoba bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita. Kita telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkoba di media elektronik maupun media cetak. Perkembangan kejahatan narkotika saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia sejak tahun 2006 hingga 2013 mengalami peningkatan (UNODC, 2015). Walaupun kurva terlihat landai namun secara jumlah totalnya cukup tinggi. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia diestimasi sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna di



tahun 2006 kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%, Namun kemudian meningkat kembali menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun yang menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun di tahun 2013 (UNODC, 2015).

Di Indonesia, peredaran narkoba sudah menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi. Wilayah Indonesia yang luas yang terdiri dari 17 ribu pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke dan jumlah populasi Indonesia yang besar sekitar 250 juta orang bagi pasar narkoba adalah pasar yang luar biasa menjanjikan. Jumlah pemakai narkoba di Indonesia tercatat sangat tinggi. Tingginya angka pemakai narkoba di Indonesia menjadikan Negara ini sebagai sasaran peredaran gelap narkoba. Berdasarkan data dari BNN tahun 2015, sebanyak empat juta jiwa (2,18 persen) dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan penyalahguna narkoba dengan usia populasi 10-59 tahun. Dari jumlah empat juta tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur dan 943 ribu orang merupakan pecandu narkoba, angka kematian akibat dampak penyalahgunaan narkoba sebanyak 12.044 orang meninggal pertahun atau 33 orang perhari.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba sudah masuk ke semua lingkungan masyarakat termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang rawan untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan terus meningkat meski terus dilakukan upaya pemberantasan dari pihak kepolisian. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel Dr. Sudirman D. Hury menyampaikan kepada media fornews.com, bahwa 60% lebih warga binaan kemasyarakatan merupakan pemilik kasus narkoba. Hal serupa juga diungkapkan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan mengatakan bahwa :

“Peredaran narkoba di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dalam jumlah besar kembali terungkap oleh Polda Sumsel. Penangkapan ini semakin memastikan Kota Palembang termasuk salah satu pasar narkoba terbesar di Sumatera. Anggota Polda Sumsel menangkap tiga pengedar narkoba yang membawa 20 kilogram paket sabu. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Juni, Palembang sudah termasuk kawasan dengan jaringan narkoba terbesar. Sebab, banyak penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah barang bukti yang sangat besar. Wilayah Palembang bukan hanya wilayah transit saja, tapi sudah jadi pasar narkoba. Palembang sudah termasuk sangat darurat narkoba. Apalagi dengan tangkapan 20 kg sabu, yang siap diedarkan di Kota Palembang”.

(<https://www.liputan6.com/3263105/polda-sumsel-benarkan-palembang-jadi-pusat-pasar-narkoba>).

Indikator naiknya kasus narkoba tersebut, salah satunya berasal dari data Polda Sumsel. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah kasus dan tersangka narkoba**

NO.	Daerah	Tahun							
		2014		2015		2016		2017	
		JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK
1	Ditres Narkoba	194	216	228	277	377	533	247	424
2	Palembang	299	388	386	457	314	353	329	400
3	Banyuasin	66	78	79	103	105	131	123	169
4	Muba	69	91	110	137	115	146	152	217
5	OKI	62	82	87	122	91	125	106	143
6	OI	63	86	57	92	83	117	106	129
7	Prabumulih	45	53	64	73	85	97	96	125
8	Muara Enim	64	100	69	96	64	102	112	155
9	Lahat	44	62	46	60	71	95	95	131
10	Pagaralam	11	26	20	31	18	26	30	38
11	OKU	77	96	84	96	88	105	88	115
12	OKU Selatan	14	24	22	38	17	24	32	38
13	OKU Timur	28	44	50	79	54	70	45	69
14	Linggau	43	65	45	61	65	100	73	93
15	Musi Rawas	51	77	54	81	71	105	87	116
16	Empat Lawang	23	35	32	44	21	29	30	43
<b>Jumlah</b>		<b>1153</b>	<b>1523</b>	<b>1435</b>	<b>1863</b>	<b>1642</b>	<b>2161</b>	<b>1759</b>	<b>2416</b>

Keterangan :

JTP : Jumlah Tindak Pidana

TSK : Tersangka

Sumber : Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel

Berdasarkan tabel 1 bahwa kasus narkoba yang berhasil diungkap di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan yaitu tahun 2016 dengan 1.642 jumlah tindak pidana dan 2161 tersangka meningkat menjadi 1759 jumlah tidak pidana dan 2416

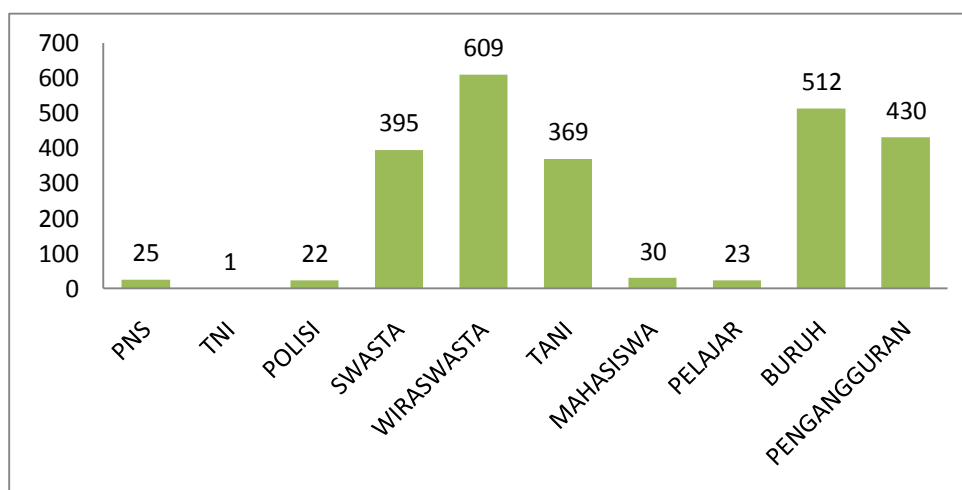
tersangka pada 2016. Angka-angka yang dilaporkan tersebut hanya puncak gunung es dari masalah narkoba yang jauh lebih besar. Meningkatnya jumlah laporan tersebut, maka Sumsel bukan lagi tempat transit melainkan sudah menjadi konsumtif narkoba.

Latar belakang pelaku penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan bervariasi. Berikut data tentang klasifikasi penyalahguna narkoba di Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.

**Tabel 2 . Tersangka narkoba berdasarkan Umur**

No.	Usia	2016	2017
1.	15	5	12
2.	16-19	81	112
3.	20-24	350	458
4.	25-29	418	521
5.	≥ 30	1307	1313
<b>Jumlah</b>		<b>2.161</b>	<b>2416</b>

Sumber : DitRes Narkoba Polda Sumsel



**Gambar 1. Kasus narkoba berdasarkan pekerjaan**

Sumber : DitRes Narkoba Polda Sumsel

Tabel 2 dan gambar 1 menunjukkan bahwa kelompok yang paling banyak kasus narkoba adalah kelompok pekerja, namun dari data tersebut dapat lihat bahwa semua masyarakat bias saja terperangkap dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi siapapun, tidak melihat dari tingginya pendidikan, namun yang membuat narkoba tidak mampu menghentikan pemakainya, seseorang tetap mempertahankan keadaan normal dengan tetap memakai narkoba, Sebab jika tidak seseorang akan merasakan sakit (*sakau*) atau tidak normal. Dengan demikian batasan penelitian ini fokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk menangani permasalahan Narkoba yang ada di Indonesia maka Pemerintah membuat Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang berwenang menangani semua permasalahan narkoba. Berdasarkan Undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Gunanya untuk memudahkan koordinasi untuk menangani permasalahan narkoba disetiap Provinsi, kabupaten dan kota.

Pasal 4 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada huruf B menyatakan bahwa tupoksi bidang pencegahan adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Sebagai upaya meneguhkan semangat bahwa narkoba adalah masalah bersama bangsa, Presiden menerbitkan Inpres nomor 12 tahun 2011 tentang upaya pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai upaya yang komprehensif dalam mengurangi permintaan dan sediaan narkoba (*demand & supply reduction*).

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi vertikal BNN Republik Indonesia dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan. Dibentuknya BNNP

Sumsel merupakan wujud nyata pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberantas dan menekan angka Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba. Berdasarkan Laporan Tahunan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan tahun 2017, kegiatan pencegahan penyalahgunaan yang telah dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 3. Kegiatan seksi pencegahan BNNP Sumatera Selatan tahun 2017**

No.	Kegiatan	jumlah
1	Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba	11 advokasi
2	Informasi P4GN kepada keluarga	9 informasi
3	Informasi P4GN kepada pelajar/mahasiswa	33 informasi
4	Informasi P4GN kepada pekerja	11 informasi
5	Informasi P4GN kepada kelompok masyarakat	29 informasi

Sumber : Laporan tahunan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Sumsel tahun 2017

Berdasarkan tabel 3 bahwa kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh BNNP Sumatera selatan sudah cukup banyak, namun setelah dilaksanakannya kebijakan pencegahan tersebut kenyataan yang ada dilapangan menyebutkan bahwa permasalahan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan ini mengalami peningkatan, artinya kebijakan dan strategi P4GN dalam bidang pencegahan yang dijalankan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan tersebut belum maksimal. Berdasarkan fenomena tersebut perlu diteliti lebih lanjut tentang implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil kinerja implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah memperoleh hasil akhir penelitian tentang implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya ilmu perguruan tinggi terkait ilmu administrasi negara dalam ruang lingkup implementasi kebijakan publik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi BNNP Sumatera Selatan dan semua pihak yang terkait mengenai upaya yang dilakukan dalam hal kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan, serta diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi pembaca yang berminat dan tertarik untuk mengkaji permasalahan yang sama.